

ANALISIS HUBUNGAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Juanda Astarani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kinerja pelaporan keuangan daerah yang dilihat dari hasil pemeriksaan (opini) Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data diambil dari website masing-masing instansi terkait. Hasil penelitian ini sendiri menunjukkan Opini Audit yang dikeluarkan oleh BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah terlihat pada hasil olahan SPSS angka koefisien determinasi hanya menunjukkan 1,2% yang berpengaruh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar itu.

Kata Kunci : kinerja pelaporan keuangan daerah, opini BPK, pertumbuhan ekonomi daerah.

1. 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1996 Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi dan puncaknya terjadi pada tahun 1997. Hal tersebut mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu untuk membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah diiringi tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah setiap tahun yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Silky, 2012). Untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif tersebut maka informasi dalam laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Untuk itu, negara menunjuk suatu lembaga yang independen untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa temuan audit, opini audit dan rekomendasi.

Sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Negara wajib menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Tri Hartono (2006) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur yang penting dalam penilaian kinerja manajemen dalam hal ini pemerintah daerah. Kedisiplinan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu juga menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Diharapkan dengan taatnya pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara rutin akan meningkatkan kinerja daerah itu sendiri yang nantinya akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan

pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisa sejauh mana hubungan antara pelaporan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui hubungan kinerja pelaporan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen* (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory*

beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen untuk mengaudit seluruh Pemda di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Dalam UU No.32 tahun 2004, Pemerintah mewajibkan bagi setiap Kepala

Daerah untuk memberikan laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah Pusat. LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD ini digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LPPD memiliki ruang lingkup yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Audit BPK

Temuan Audit BPK

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008). Menurut Hall (2007) audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Audit eksternal seringkali disebut sebagai audit independen” karena dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang independen dari manajemen perusahaan kliennya. Auditor eksternal mewakili berbagai kepentingan pemegang kepentingan pihak ke tiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor dan badan pemerintah (Hall, 2007).

Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara

independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) dalam Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

Opini Audit BPK atas LKPD

Pada pemerintah daerah, kinerja keuangan diukur melalui beberapa alat ukur kinerja keuangan. Salah satunya yang paling umum adalah audit atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit atas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pada saat itu.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil akhir

dari pemeriksaan keuangan adalah opini; pemeriksaan kinerja adalah kesimpulan dan rekomendasi; sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan.

Pada pemeriksaan keuangan, BPK tidak hanya memberikan opini namun juga menilai tingkat efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada LHP BPK dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perjalanan dinas fiktif;
2. Belanja atau pengadaan fiktif lainnya;
3. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
4. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
5. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
6. Pemahalan harga (mark up);
7. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
8. Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
9. Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
10. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
11. Belanja tidak sesuai ketentuan atau lebih ketentuan; dan
12. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan (Mangkunegara, 2014).

Menurut Rai (2008) dalam Akbar dan Djazuli (2015), ada tiga jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 yang terdiri dari audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

“Audit atas laporan keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”

“Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN (2007) disebutkan:

“Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. “Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa”.

Hasil audit keuangan adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. WDP diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan sehingga auditor memberikan opini WDP adalah adanya penyimpangan prinsip yang material dan pembatasan lingkup pemeriksaan yang berdampak material. TMP diberikan oleh auditor apabila terdapat penyimpangan prinsip akuntansi (salah saji), baik secara individual maupun agregat, yang sangat material. Sedangkan opini TW diberikan apabila terdapat pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai.

Selain itu dalam kondisi ekstrim, meskipun bukti pemeriksaan terkait setiap ketidakpastian telah cukup memadai, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan. (SPKN, 2007)

Hasil akhir dari pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dan kesimpulan atas keekonomian, efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi (Akbar dan Djazuli, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Joseph Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha (wiraswasta). Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut:

1. Diperkenalkannya teknologi baru.
2. Menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi.
3. Menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut

berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Menurut pandangan Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan ekonomi maka semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi bertambah lambat. Yang pada akhirnya akan tercapai keadaan tidak berkembang (stationary state).

Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Model ini dipelopori oleh Stein pada Tahun 1964, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman dan Siebert. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan produksinya, sedangkan kegiatan produksi daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antardaerah. Dalam hal ini penganut aliran Neo Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan pertumbuhan ekonomi cenderung melebar.

Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Namun para pakar ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik diatas, dapat dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan diantara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal akan lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan karakteristik Pemda sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh karakteristik Pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Sumarjo (2010) yang mengaitkannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, Ardhani (2011) mengaitkan dengan pengalokasian anggaran belanja modal, Suhardjanto (2009), Rusmin (2009), Mandasari (2009) mengaitkan dengan kepatuhan pengungkapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mengaitkan dengan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel temuan audit Hilmi dan Martani (2012) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan pemda, Zaelani dan Martani (2011) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel dependen yang menjadi proksi dari kelemahan pengendalian internal suatu Pemda. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, namun masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa

metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Rohman dan Nugroho (2012) meneliti mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening, di mana penelitiannya mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Florida (2007) dengan objek penelitiannya adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari realisasi Anggaran Laporan Pendapatan dan Belanja (APBN) dari kabupaten kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Julitawati, *et al* (2012) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian Wenny (2012) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang

digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Sumarjo (2010) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah, ukuran (*size*) legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental Revenue*. Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage* dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan

informasi mengenai permasalahan di luar kepustakaan. Penelitian lapangan ini dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan hubungan antara opini BPK (Badan Pengawas Keuangan) dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengoperasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi literature baik dari buku, jurnal, penelitian, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2017.
- b. Data Opini Audit dari BPK untuk masing-masing sampel tahun 2017.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website BPS (Badan Pusat Statistik) masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat serta dari website BPK RI.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten/kota.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Penelitian ini merupakan kategori *Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara cermat dengan menggunakan ciri-ciri atau syarat-syarat tertentu atau spesifik. kriteria atau syarat-syarat untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Merupakan kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan.
3. Mendapat Opini Audit dari BPK RI

Berdasarkan kriteria diatas, maka terpilih sebanyak 14 kabupaten/kota sebagai sampel dalam penelitian ini yang dipilih secara acak dengan metode *random sampling*.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara memperoleh informasi melalui benda-benda tertulis, yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain jurnal, skripsi, maupun buku-buku yang relevan dalam membantu menyusun penelitian ini, juga termasuk buku-buku terbitan instansi pemerintah. Instansi yang dimaksud seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dalam melakukan penelitian.

Identifikasi Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini BPK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang telah diadopsi dari literatur-literatur yang ada dan digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Adalah variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Di dalam penelitian ini digunakan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel tidak bebas. Pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan dengan nilai konstan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam satuan rupiah).

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang nilainya berpengaruh terhadap variabel lain. Yang menjadi variabel independen adalah kinerja pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dalam penelitian ini menggunakan Opini BPK yang terbagi menjadi 5 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), WTP Dengan Paragraf Penjelasan, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Penilaian (TMP).

Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh dari Opini BPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Variabel X adalah variabel bebas (independen variabel), sedangkan variabel tidak bebas (dependen variabel) yang digunakan adalah Y.

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

X = Opini BPK

Koefisien Determinasi R^2 (Goodness Of Fit)

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (goodness of fit), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi data (variabel independen) yang dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai

R^2 , maka garis regresi sampel semakin baik. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 , yang terletak pada $0 < R^2 < 1$ (Gujarat Damodar, 1987 hal 67).

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal/tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati mendekati normal.

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji tidak berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi di diatas 0,05 berarti data yang akan diuji berdistribusi normal (Santoso, 2002:35).

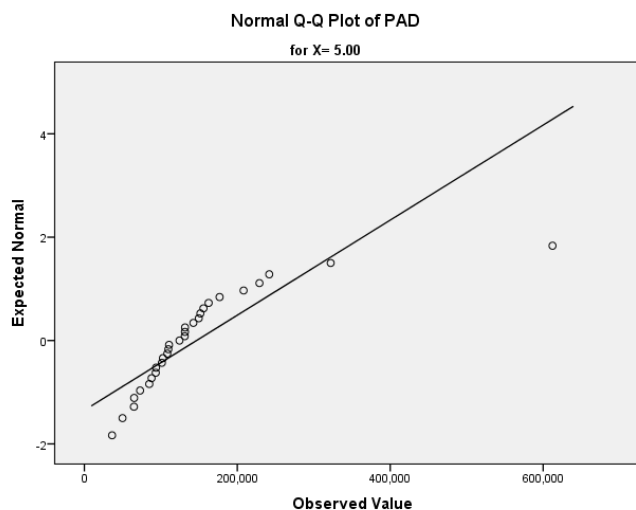
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Asumsi normalitas merupakan prasyarat untuk dapat dilakukannya berbagai teknik statistik inferensial, khususnya statistik parametrik termasuk untuk analisis regresi. Untuk itu, sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametrik, maka harus membuktikan terlebih dahulu apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data. Dalam penelitian ini digunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian menggunakan bantuan komputer program SPSS. Uji normalitas dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yang berarti ada 2 hasil uji normalitas, yaitu untuk variabel X dan Y. Berikut adalah output analisisnya:

Tabel 4.1
Output Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



Pada output Plot di atas, uji *Kolmogorov-Sminov* dijelaskan data suatu variabel akan dikatakan berdistribusi normal jika terlihat ada garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Garis itu berasal dari nilai z. Jika suatu distribusi data normal, maka data akan tersebar di sekeliling garis. Pada output di atas, terlihat bahwa data tersebar di sekeliling garis (kecuali ada beberapa data yang outlier). Karena itu bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal.

Persamaan Regresi

Analisis regresi merupakan alat untuk meramalkan nilai pengaruh variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Model hubungan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dengan variabel lain dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$Y = 65957,218 + 16137,364X$$

Dimana :

Y =PAD

X₁ = Opini BPK

Persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki nilai positif pada konstanta yaitu 65957,218 menyatakan bahwa Opini BPK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh hasil dari Opini BPK.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y) maka dilakukan uji Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam uji hipotesis sebagai berikut:

1. Menentukan signifikansi pengaruh variabel bebas Jika taraf signifikansi pada output di atas lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel independent (X) berpengaruh secara signifikan terhadap dependent (Y).
2. Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} Pada $N = 35$ diketahui besarnya nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau hipotesis (H_a) diterima, namun jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau hipotesis ditolak (H_a ditolak).

Hasil pengujian hipotesis menggunakan program SPSS diketahui sebagai berikut:

Opini BPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (yang diukur menggunakan PAD)

Hipotesis yang berbunyi “opini BPK berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah” Hasil perhitungan SPSS terhadap hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.2
Output Uji Hipotesis

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65947.218	120374.973		.548	.587
	Opini BPK	16137.364	25515.348	.109	.632	.531

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil pada tabel output diatas, maka kesimpulan yang diambil adalah Opini BPK (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau **H_a ditolak**. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan dua ketentuan yang ada, yaitu:

- a) Nilai sig. Output opini BPK (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,531 (lebih besar dari 0,05).
- b) Nilai t_{hitung} (0,632) Output opini BPK (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) lebih besar dibandingkan t_{tabel} (-2,042).

Koefisien Determinasi

Persentase pengaruh variabel independent terhadap nilai variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X terhadap Y dapat diketahui dari besarnya korelasi antara X terhadap Y yang dikuadratkan (*R square*). Nilai *R square* pada *output* SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.3
Output Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.109 ^a	.012	-.018	113781.61512

a. Predictors: (Constant), Opini_BPK

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai *R square* antara X terhadap Y sebesar 0,012 sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara X terhadap Y sebesar 1,2% sedangkan selebihnya 98,8% dipengaruhi variabel lain diluar model.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan ialah sebagai berikut :

Opini Audit yang dikeluarkan oleh BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah terlihat pada hasil olahan SPSS angka koefisien determinasi hanya menunjukkan 1,2% yang berpengaruh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar itu.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian diantaranya:

1. Berdasarkan hasil analisis dan uji statistik, maka penulis menyarankan hendaknya Pemerintah Daerah meningkatkan sektor-sektor yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah sehingga perekonomian daerah menjadi lebih baik.
2. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, hendaknya dilakukan penelitian dengan mengidentifikasi faktor lain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar, 1995, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- Mankiw, Gregory N. 1999. *Teori Makro Ekonomi*, edisi keempat. Erlangga : Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2006, *Ekonomika Pembangunan Teori , Masalah, dan Kebijakan*, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Neni, Pancawati. 2000. *Pengaruh Rasio Kapital- Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2, 179- 185
- Ariefiantoro, Teguh. dan Saddewisasi, Wyati., (2011). “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang*”, *J. DINAMIKA SOSBUD* Vol. 13, No2:153-158.
- Sadono Sukirno, 2007, *Ekonomi Pembangunan*, Kencana Pers, Jakarta
- Samuelson, Paul A & William D. Nordhaus, (1993), *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Suparmoko, M, 2002, *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta.
- Todaro, Michael. (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta, Erlangga.
- Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, FE UII, Yogyakarta.
- Adzani, Akhmad Hafidzan dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*, Nusa Tenggara Barat, 24 – 27 September 2014. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2016/05/BF-B2c2-13-Pengaruh-Kesejahteraan-Masyarakat...-Dwi-Martani.pdf> diakses pada 14 Nove,ber 2018.
- Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad. 2015. Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015: 1–19.
- Akib, Mulyati. 2014. *Implementasi Good Governance untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Se Sulawesi Selatan-Tenggara*. Disertasi S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/158/--mulyatiaki-7883-1-14-mulya-b.pdf>. Diakses pada 16 November 2018.
- Asmoko, Hindri. 2014. Korelasi Opini Audit Bpk Atas LKKL dengan Hasil Evaluasi Lakip K/L. Artikel Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20424-korelasi-opini-audit-bpk-atas-lkkl-dengan-hasil-evaluasi-lakip-k-l>. Diakses pada 8 November 2018.

Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Prestasi, Vol 9 no. 1 (2012).
<http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/issue/view/3> diakses pada 21 November 2018.